

IMPLEMENTASI TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA

I Made Darsana

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Email: made.darsana@ipb-intl.ac.id

Abstrak

Peran strategis Perguruan Tinggi Pariwisata dalam pembangunan pariwisata nasional, sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Indonesia yang kemudian diikuti dengan berbagai rangkaian program kemitraan antara Sekolah Tinggi Pariwisata dengan lembaga pemerintah (Kemendikbud), organisasi industri dan asosiasi di bidang pariwisata. Daya dukung Perguruan Tinggi Pariwisata diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian Pariwisata terkait dengan 3 program utama (top 3), yakni: digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara (connectivity) dari 10 program prioritas (top 10) yakni: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui peran perguruan tinggi pariwisata dalam mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian pada masyarakat dalam menunjang program Kementerian Pariwisata yakni 3 program utama (top 3) dan 10 program prioritas (top 10).

Keywords: Tri Darma Perguruan Tinggi, 3 Program Utama, 10 Program Prioritas Kementerian Pariwisata

PENDAHULUAN

Seperti yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengharuskan Sekolah Tinggi Pariwisata di Indonesia dituntut untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terkoordinasi dengan Kemenristekdikti. Dalam konteks persaingan, pendidikan tinggi pariwisata dihadapkan pada persaingan yang bersifat global dengan institusi-institusi pendidikan tinggi lainnya yang secara terus menerus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas, baik pada sisi *input* (masukan), proses, maupun kualitas *output* (lulusan). Hal ini telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam mengelola sebuah sistem pendidikan agar mampu menjawab dinamika kebutuhan dunia kepariwisataan dan memanfaatkan serta mengelola peluang yang ada agar menjadi institusi pendidikan pariwisata yang lebih kompetitif dan profesional di Indonesia. Mensinergikan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan program pemerintah khususnya kementerian pariwisata dapat diwujudkan melalui dukungan nyata terhadap Program Kementerian Pariwisata, yakni 3 program utama (top 3), yakni: digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara (connectivity) dari 10 program prioritas (top 10) yakni: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

PERMASALAHAN

Bagaimanakan peran perguruan tinggi pariwisata dala mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian Masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata Indonesia untuk mendukung program 3 program utama (top 3) Kementerian Pariwisata, yakni: digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara (connectivity) dari 10 program prioritas (top 10) yakni: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Kajian ini merupakan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi terkait dengan peran perguruan tinggi kepariwisataan dalam menunjang pengembangan kepariwisataan di Indonesia yang diselaraskan dengan program kementerian kepariwisataan.

METODE ANALISIS

Untuk memecahkan masalah dalam analisi ini, Penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Menurut Whitney (1960:160), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Nazir (2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diselidiki.

PEMBAHASAN

Mengacu pada Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2010 - 2014 dinyatakan bahwa tantangan pembangunan sektor kepariwisataandalam RPJPN Tahun 2005–2025, Sekolah Tinggi Kepariwisataan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perguruan Tinggi Pariwisata harus terus berupaya secara berkesinambungan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya agar mampu mencapai tujuannya dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing internasional. Upaya tersebut dapat dicapai apabila penyelenggara Pendidikan Kepariwisataan yang memiliki *grand rategy* yang berorientasi jauh ke depan dengan memanfaatkan setiap peluang(*opportunities*) dan mengoptimalkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki. Peran strategis Sekolah Tinggi Pariwisata dalam pembangunan pariwisata nasional, sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Indonesia yang kemudian diikuti dengan berbagai rangkaian program kemitraan antara Sekolah Tinggi Pariwisata dengan lembaga, organisasi, industri danasosiasi di bidang pariwisata. Peluang dan tantangan berat ke depan harus diantisipasi oleh lembaga, dengan meningkatkan jejaring (*networking*) dan kemitraan (*partnership*)

dengan semua *stakeholder* terkait. Salah satu bentuk kemitraan yang dapat dilakukan adalah melalui aliansi strategis (*strategic alliance*). Aliansi strategik merupakan fenomena yang begitu menjamur di hampir setiap sektor business. Strategi bersaing dan saling memhatikan makin lama makin ditinggalkan. Argumentasi dari pelaku alliansi amat sederhana, bahwa daripada bersaing saling memhatikan, mengapa tidak bergandeng tangan dan bekerja sama saling melengkapi dan saling menguntungkan? Logika ini agaknya mudah dipahami karena kata kunci dalam era globalisasi adalah persaingan dan efisiensi, dimana sebuah organisasi/lembaga tidak bisa melakukan semua hal secara sendiri-sendiri. Jelas kerja sama dalam bentuk aliansi akan membawa banyak manfaat bagi organisasi. Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh para pelaku/lembaga jika mereka melakukan aliansi dengan beberapa mitra yang punya integritas yang tinggi dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, diantaranya: (1) meningkatkan kualitas pemasaran; (2) membuka pasar lebih luas; (3) lebih produktif; (4) lebih mudah menemukan solusi; dan (5) pertukaran informasi dan testimoni. (<http://sellyoktaviany.wordpress.com/2010/11/26/>). Aliansi strategis telah banyak dilakukan dalam otomotif, telekomunikasi, dan jasa lainnya dengan tujuan tertentu dan memberikan banyak manfaat bagi pihak yang melakukannya. Dengan melakukan kerjasama dalam bentuk aliansi strategis, perusahaan/lembaga mendapatkan akses secara cepat ke dalam wilayah di mana mereka tidak memiliki keahlian atau kemampuan membuat produk lain. Persaingan yang begitu sengit pada era global seperti sekarang ini membuat perusahaan/lembaga tidak dapat menunggu untuk mengembangkan sumber sumber tersebut sendirian, karena jika tidak mereka tidak akan bertahan. Dalam bidang pendidikan, aliansi strategis (*partnership*) dapat dilakukan baik dengan sesama lembaga pendidikan maupun dengan pihak industry atau *stakeholder* lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang semakin ketat. Untuk Sekolah Tinggi Pariwisata sebagai penyelenggara pendidikan kepariwisataan, aliansi perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang berkenaan dengan SDM pariwisata berkenaan dengan (1) keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi; (2) tidak tersedianya kurikulum yang berbasis kompetensi global; serta (3) kurangnya tenaga-tenaga pengajar yang mempunyai pengalaman di usaha pariwisata dan kurangnya program pengembangan pengajar yang selalu mengikuti perkembangan yang terjadi pada industri pariwisata. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Pariwisata untuk melakukan aliansi dengan lembaga pendidikan sejenis, sebagai upaya agar dapat berkiprah dan mampu merebut pasar, paling tidak tetap bertahan dalam persaingan. Menyadari beratnya persaingan ke depan, saat ini Sekolah Tinggi Pariwisata telah dan terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai industri pariwisata (hotel, biro perjalanan umum, perusahaan penerbangan, taman rekreasi, dan lain-lain), organisasi profesi (PHRI, ASITA, WTO, IATA, dan lain-lain), instansi pariwisata baik pusat maupun daerah serta pemerintah daerah baik kabupaten maupun Propinsi di Indonesia melalui berbagai program implementasi yang telah dilakukan. Beberapa kerjasama dengan pihak ketigatelah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Pariwisata yang berfungsi memfasilitasi lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata dalam hal mencari

pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri, sehingga dengan demikian sejalan dengan salah satu kebijakan Kementerian Pariwisata dalam hal lulusan mahasiswa yaitu “*Pro-poor, pro job, pro-growth, pro-environment*“, yaitu: (1) Menjalin kerjasama dengan berbagai macam hotel dan usaha pariwisata di dalam dan luar negeri dalam rekrutmen (mencari berbagai peluang baru, terutama untuk pengiriman alumni keluar negeri dan memberi rekomendasi kepada alumni yang akan bekerja); (2) Menverifikasi dan memfasilitasi *recruitment agency*; (3) Menginisiasi MoU. Terkait dengan implementai dari Perguruan Tinggi maka, peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pengembangan Pariwisata Melalui Digitalisasi, Homestay Desa Wisata, dan Connectivity telah dicanangkan oleh kementerian Pariwisata sejak tahun 2017. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu; pangan, energi, maritim, kawasan industri dan KEK, serta pariwisata. Dari kelima prioritas pembangunan ini, sektor pariwisata ditetapkan sebagai *leading sector* karena sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan devisa yang besar serta menciptakan lapangan kerja yang paling mudah dan murah (Arief Yahya, 2017). Lebih lanjut Arief Yahyamenjelaskan sebagai berikut:

..... “*Kontribusi devisa pariwisata terhadap penerimaan devisa nasional tahun 2015 sebesar US\$ 12,6 miliar atau mencapai 9,3% secara nasional dan menempati ranking ke-4 setelah minyak bumi dan gas (US\$ 18,9 miliar), batu bara (US\$ 16,4 miliar), dan kelapa sawit (US\$ 15,5 miliar). Namun demikian, hanya sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,8% sampai 6,9% atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri agrikultur, manufaktur, otomotif, dan pertambangan,*” paparnya.

Perkembangan kepariwisataan yang positif seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya tersebut membutuhkan sinergi yang kuat dari lima pemangku kepentingan utama pariwisata yang terhimpun dalam sinergitas *pentahelix* (akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media) sebagai upaya mewujudkan target nasional 2019 yakni; 1).Mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan perolehan devisa sebesar Rp 280 triliun dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air; 2).Kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 8%; 3).Menciptakan 13 juta lapangan kerja; 3).Serta daya saing pariwisata Indonesia akan berada di ranking 30 dari posisi sekarang di ranking 50 dunia.

Lebih lanjut Arief juga menambahkan mengungkapkan, sebagai upaya mewujudkan target tersebut, Kemenpar menetapkan 3 program utama (top 3) dari 10 program prioritas (top 10) yang harus dilaksanakan tahun sejak tahun 2017 yaitu; digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara (connectivity). Digital tourism dipilih sebagai tantangan global dalam mengantisipasi perubahan perilaku konsumen pariwisata dunia terutama di kalangan generasi milenial yang membutuhkan dukungan digital untuk melakukan perjalanan wisata atau *always-connected travelers*, sedangkan pilihan pembangunan homestay desa wisata merupakan terobosan dalam menyediakan fasilitas akomodasi di 10 destinasi prioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai)

dengan melibatkan masyarakat setempat karena lebih mudah dibandingkan membangun hotel,” Kemenpar menargetkan 100 ribu homestay dapat terbangun hingga tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip ”you get more you pay less”. Sementara itu program peningkatan aksesibilitas udara (connectivity) merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan seat capacity terutama pada 10 destinasi prioritas dalam rangka mendukung tercapainya target 20 juta wisman pada 2019. Ditegaskan oleh Aririef:

.... *“Dalam mewujudkan pariwisata sebagai leading sector melalui program Top 3 tersebut membutuhkan kontribusi nyata dari Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada 10 destinasi prioritas sehingga terjadi akselerasi pembangunan kepariwisataan yang nyata.”*

Arief mengatakan, peran akademisi amat penting terutama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang secara eksplisit, peran pendidikan tinggi pariwisata saat ini dibutuhkan untuk menjadi mitra pemerintah untuk menindaklanjuti ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai kesepakatan bersama tentang diterimanya standar kualifikasi bagi tenaga profesionalisme pariwisata di antara negara ASEAN. Sejalan dengan pendapat Arief, Deputy Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Ahman Sya mengatakan, perlu menjalin kemitraan strategis antara Kemenpar dengan HILDIKTIPARI. Secara tegas Ahman Sya (2017) menjelaskan:

.....” *Kemitraan strategis antara Kemenpar dengan Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia ini sudah lama dibina antara lain dalam bentuk komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia, kemudian sebagai salah satu tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah Kemenpar memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di seluruh perguruan tinggi pariwisata untuk pencapaian target tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi di Indonesia.”*

Sinergi yang digagas oleh Kementerian pariwisata ini memberi aktif pada Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia terkait dengan program Top 3 Kemenpar yakni digital tourism, homestay desa wisata, dan konektivitas udara, serta wujud partisipasi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program utama maupun program percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas. (<https://travel.kompas.com/read/2017/11/18/122700027/10-destinasi-bali-baru-4-destinasi-jadi-prioritas>)

Gambar 1



Sumber:

<https://images.search.yahoo.com/yhs/foto+10+destinasi+bali+baru.+program+kemepar>.

Sebagai sebuah institusi pendidikan di bidang Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia profesional dan kompeten di sektor pariwisata. Sekolah Tinggi Pariwisata selayaknya berada di garis depan pembangunan kepariwisataan nasional dan menjadi institusi pendidikan yang terkemuka di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Agar tetap eksis dan memiliki daya saing, Sekolah Tinggi Pariwisata dalam melaksanakan sistem pendidikannya harus mampu melakukan perubahan paradigma yang mendasar yang diikuti dengan tindakan reposisi yang bersifat strategis dengan percepatan yang tinggi melalui langkah-langkah yang cerdas dan tepat dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Gambar 2



Sumber:

<https://images.search.yahoo.com/yhs/foto+10+destinasi+bali+baru.+program+kemenpar>

Sekolah Tinggi Pariwisata dalam menghadapi perkembangan internal dan eksternal yang ada, dituntut untuk mengembangkan organisasi dan strategi yang memungkinkan terciptanya iklim bagi bertumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi. Sekolah Tinggi Pariwisata dituntut untuk mampu mengembangkan gagasan baru, mengerjakan dengan cara yang berbeda dan memikirkan pendekatan alternatif. Sekolah Tinggi Pariwisata juga dituntut untuk melaksanakan pengembangan yang terencana dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat pendidikan dan pariwisata pada umumnya, sesuai perannya yang termaktub dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

- 1) Peran akademisi dalam hal ini Perguruan Tinggi Pariwisata, amat penting terutama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang secara eksplisit, tercermin dari kiprah pendidikan tinggi pariwisata yang sangat dibutuhkan untuk menjadi mitra pemerintah dalam menindaklanjuti ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai kesepakatan bersama tentang diterimanya standar kualifikasi bagi tenaga

profesionalisme pariwisata di antara negara ASEAN, sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

- 2) Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi dapat diwujudkan oleh Perguruan Tinggi Pariwisata melalui dukungan nyata dalam peran serta Perguruan Tinggi mewujudkan 10 destinasi prioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai) yang telah ditetapkan oleh Kemenpar menjadi program prioritas pengembangan pariwisata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2010). *UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.

F.L, Whitney. 1960. *The Elements of Resert*. Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co.

<https://travel.kompas.com/read/2017/11/18/122700027/10-destinasi-bali-baru-4-destinasi-jadi-prioritas>.

<https://vakansi.co/peran-perguruan-tinggi-dalam-mendukung-program-pengembangan-pariwisata>

<http://sellyoktaviany.wordpress.com/2010/11/26/>.

UUNo. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Menpar dan Ekonomi Kreatif. 2012. *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*. Jakarta

Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia